

INDONESIA

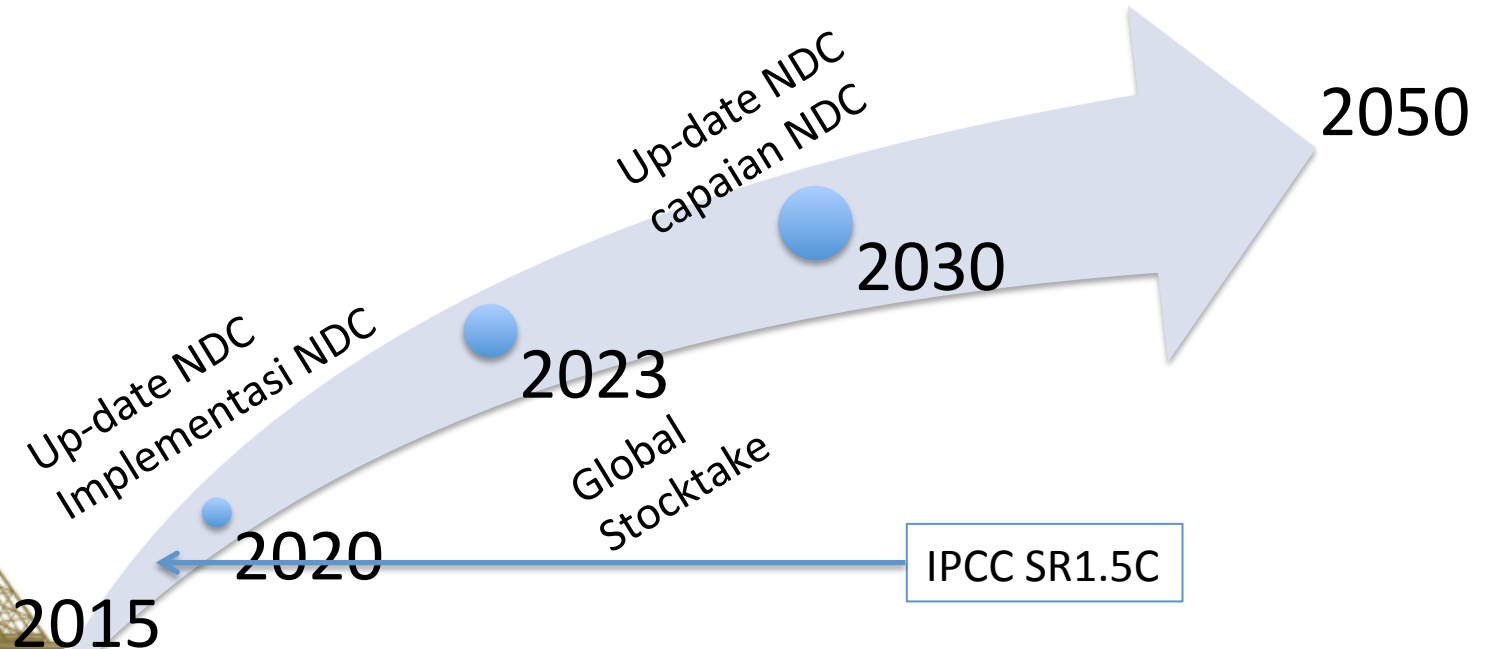
MENUJU LONG-TERM LOW GHG EMISSION DEVELOPMENT STRATEGIES 2050 (LTS 2050)



DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

19 November 2019

MANDAT



Art. 2.2: equity, CBDR, RC, different national circumstances

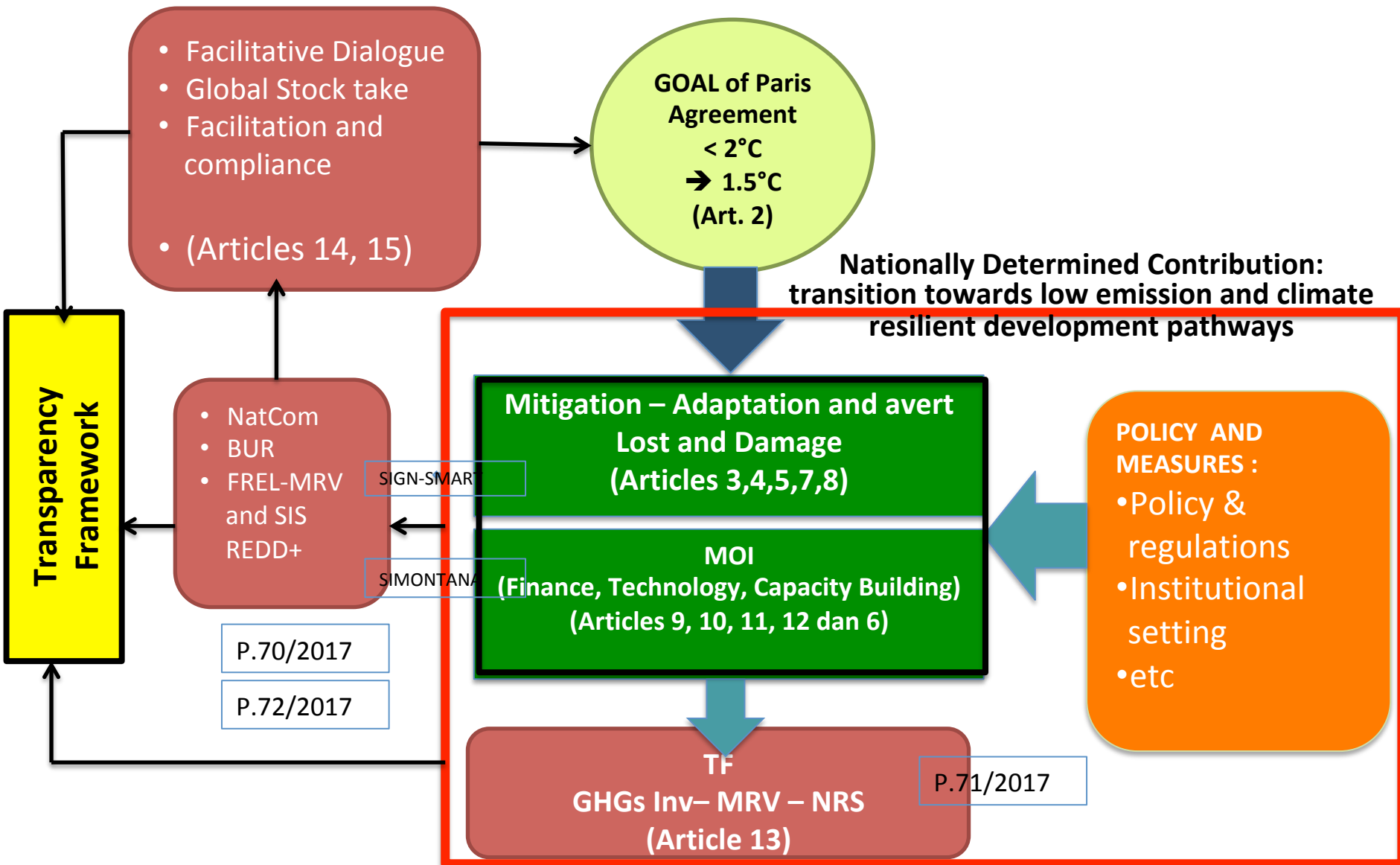
Art. 4.19: should strive to formulate and communicate LTS

Art. 3: support to developing countries

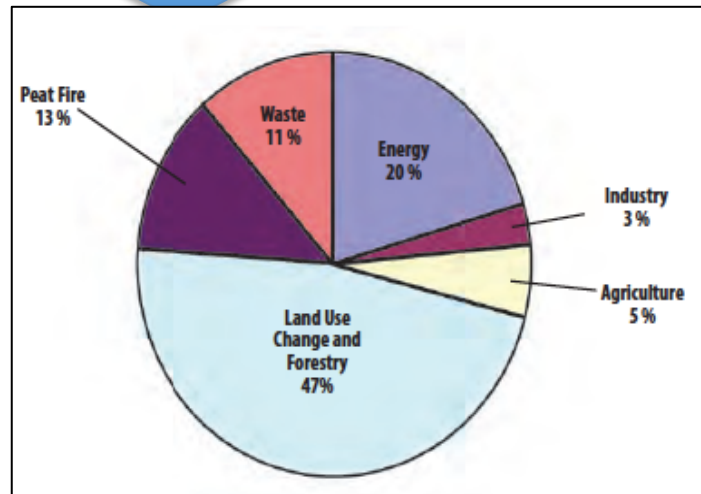
Dec 1/CP. Para 35: by 2020, communicate LTS

Dec.1/CP 21 Para 105: Doha Amendment

PARIS AGREEMENT AND NDC AND IMPLEMENTATION AT NATIONAL LEVEL



Total GHG emission (CO₂, CH₄, N₂O)



2000 : 1,377,982 Gg CO₂e
2005 : 1,791,371 Gg CO₂e

(Second National Communication Indonesia, 2010)

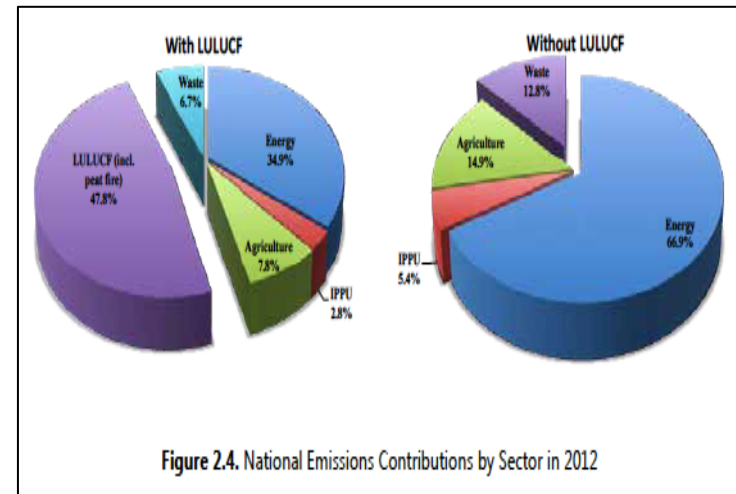


Figure 2.4. National Emissions Contributions by Sector in 2012

2012 : 1,453,957 Gg CO₂e
(First BUR Indonesia, 2015)

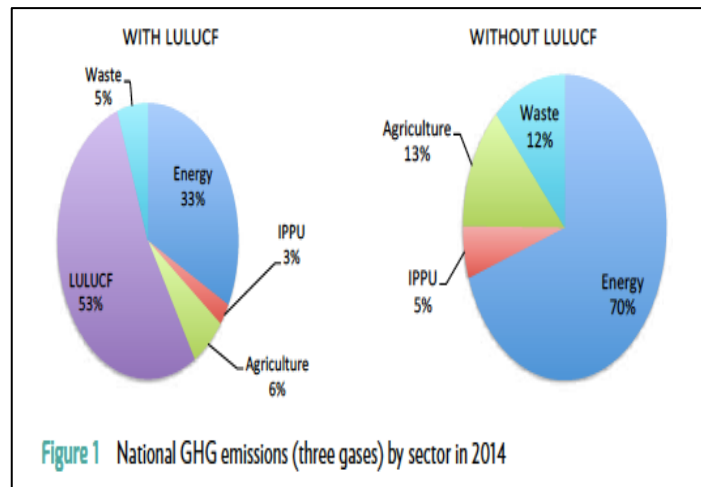


Figure 1 National GHG emissions (three gases) by sector in 2014

2014 : 1,844,329 Gg CO₂e

Third National Communication Indonesia, 2017

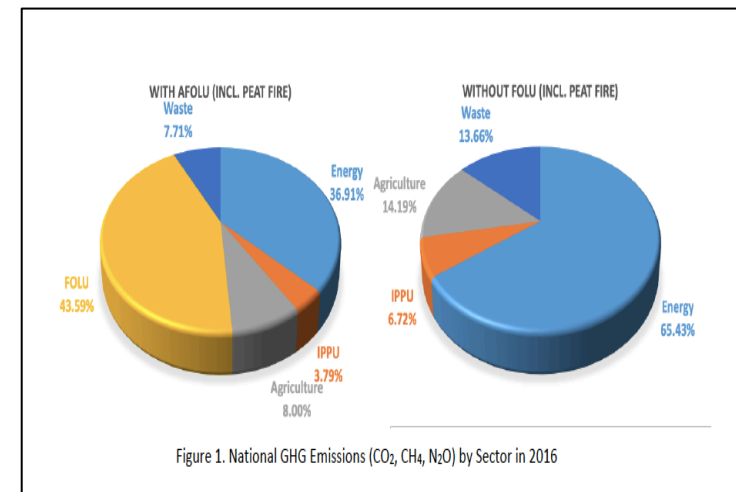
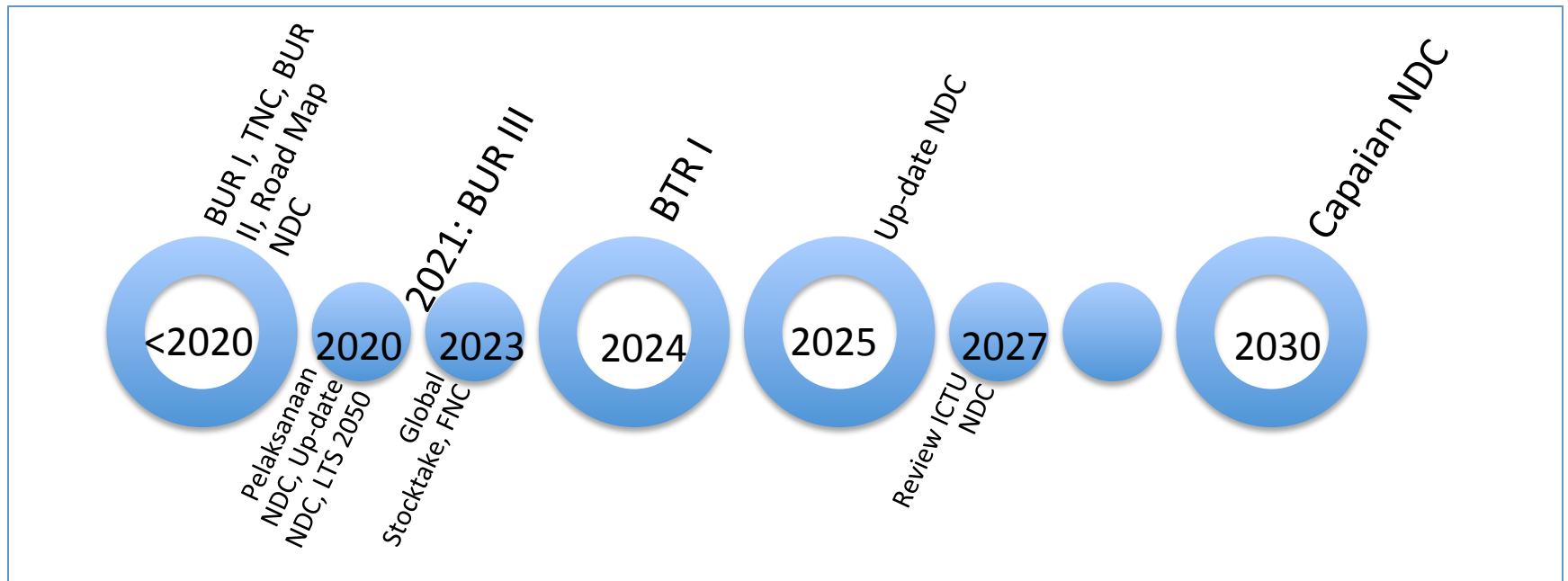


Figure 1. National GHG Emissions (CO₂, CH₄, N₂O) by Sector in 2016

2016 : 1,457,774 Gg CO₂e
(Second BUR Indonesia, 2018)

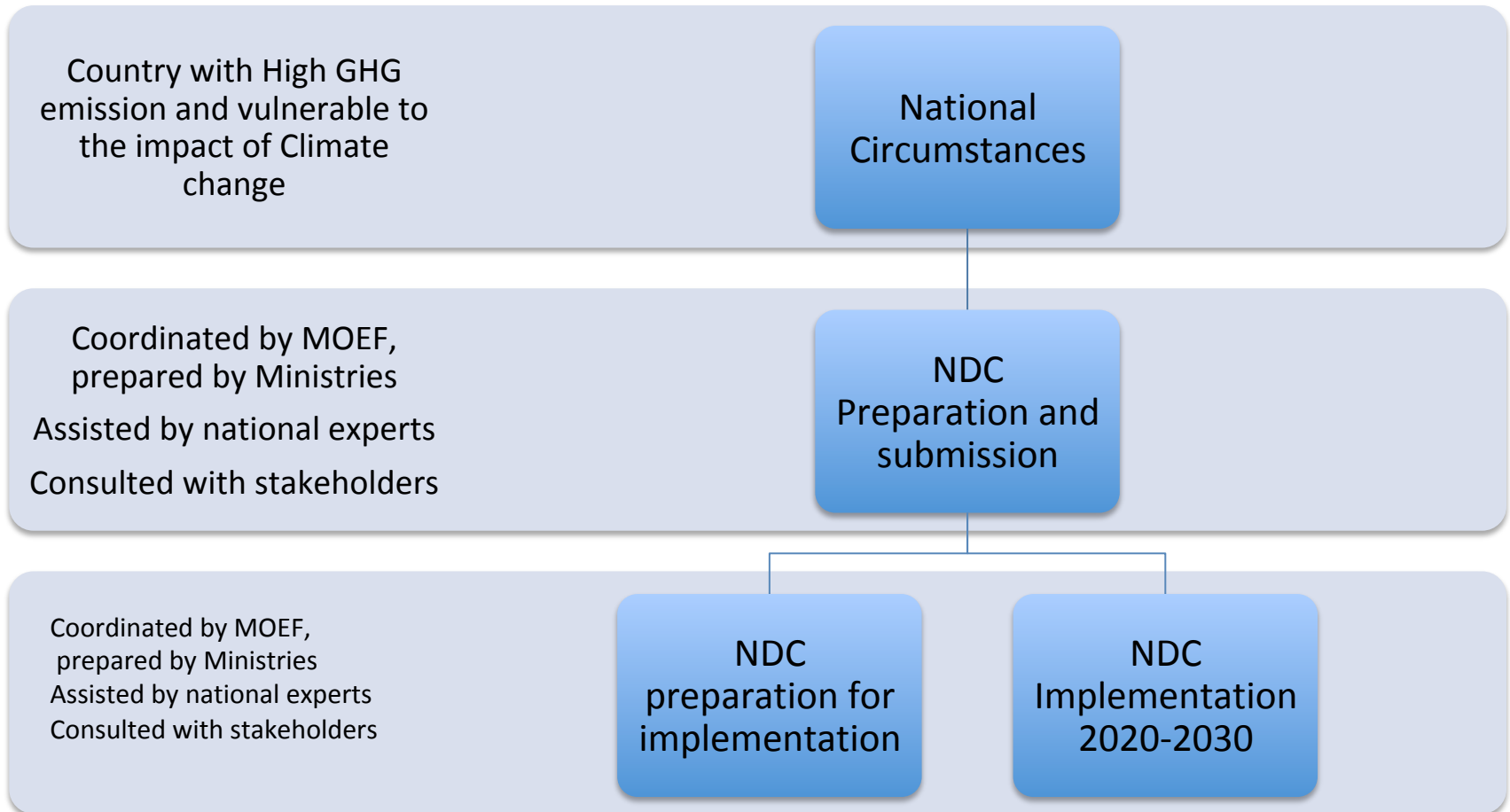
MENUJU 2030



- Pelaksanaan aksi sesuai perencanaan
- Enabling condition: kebijakan, peraturan, kelembagaan, MOI terpenuhi
- Perangkat pendukung: SRN, MRV, RBP REDD+

Peran Non-Party Stakeholders

Kerangka Umum



The First NDC Indonesia

- Low carbon and climate resilience development
- Indonesia' vulnerability to climate change
- Land-based and ocean adaptation and mitigation
- Transparency Framework
- Means of Implementation
- International cooperation

Key feature



Social and Livelihood Resilience



Economic Resilience



Ecosystem and Landscape Resilience

Projected BAU and emission reduction from each sector category

Reduction	Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012*
Total BaU		
CM2		
%	14%	6.7%
%	1%	6.3%
%	0.11%	3.4%
%	0.13%	0.4%
%	23%	0.5%
%	38%	3.9%
		4.50%
		4.00%
		0.10%
		1.30%
		2.70%
		3.20%



**FIRST NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION
REPUBLIC OF INDONESIA**

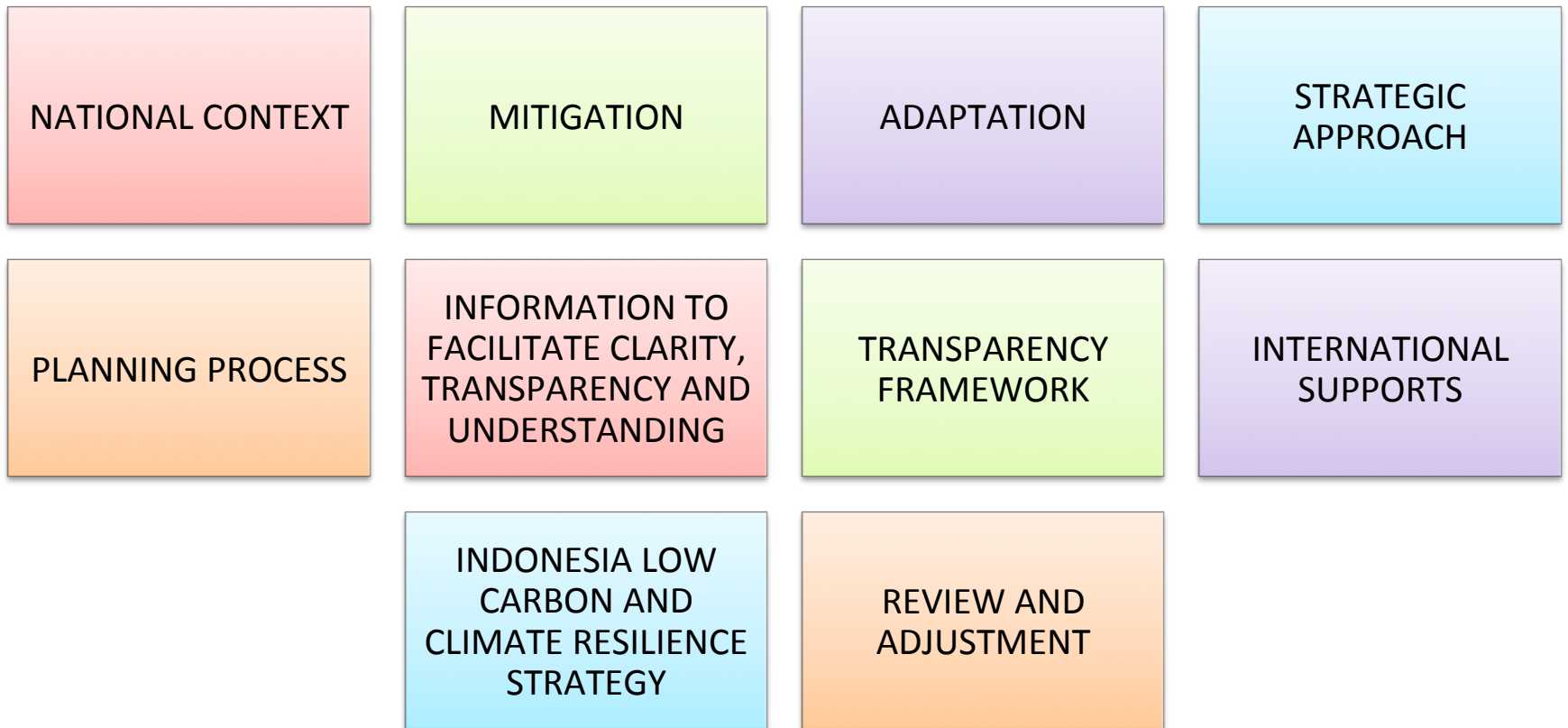
(Persetujuan Presiden RI
melalui surat Mensesneg No. 1009/2016)

November 2016

BAU

and ecosystem
mitigation and mitigation

STRUCTURE



Mitigation Action in achieving NDC target

- Efficiency in final energy consumption
- Implementation of clean coal technology in power plant.
- Renewable energy in electricity production.
- Implementation of biofuel in transportation sector
- Additional gas distribution lines
- Additional compressed natural gas fuel stations (SPBG)

Energy



- Decreasing deforestation rate* .
- Enhancing the implementation of sustainable forest management, both in the area or natural forest (decreasing forest degradation) and human tanaman* .
- Land rehabilitation.
- Peat restoration.

Forestry



- The use of low-emission crops.
- Implementation of water-efficient concept in water management.
- Manure management for biogas.
- Feed supplement for cattle.

Agriculture



- Solid waste management
 - Enhancement of LFG recovery from 2010 to 2030.
 - Enhancement of the percentage of waste utilization by composting and 3R (paper).
 - Enhancement of the percent-age of PLTSA/RDF implementation, compare
- Management of industrial liquid waste.
- Management of domestic

Waste



- Cement industry implements “clinker to cement ratio” (blended cement) .
- Enhancing efficiency by feedstock utilization and CO2 recovery in Primary Reformer in petrochemical industry (in particular ammonia production).
- Other actions:
 - Steel industry implements: CO2

IPPU

-industrial processes and product use



Enabling Condition

dalam rangka mencapai target NDC sektor berbasis lahan

Kehutanan dan Pertanian

- Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi.
- Pembatasan luasan degradasi hutan.
- Pembatasan hutan primer yang mengalami degradasi
- Pembatasan luasan hutan primer yang mengalami degradasi secara legal.
- Penetapan target luas areal dengan penerapan sistem pengelolaan hutan lestari, misalnya penerapan kegiatan ENR dan pengayaan.
- Penetapan target penanaman tanpa rotasi pada lahan mineral.
- Penetapan target luasan lahan yang harus direhabilitasi.
- Penetapan target luas HTI baru yang harus dibangun (dan target bahwa Pembangunan HTI baru harus memanfaatkan lahan tidak produktif dan lahan pertanian semusim.
- Penetapan target luasan perbaikan pengelolaan tata air di area perkebunan (HGU) dan hutan tanaman industri (HTI)
- Penetapan target luasan Luas gambut yang harus direstorasi
- Pembatasan laju konversi lahan untuk lahan pertanian.
- Penetapan target peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan
- penetapan target luasan lahan yang menggunakan varietas rendah emisi GRK.

Enabling Condition

dalam rangka mencapai target NDC sektor berbasis non lahan

Sektor Energy, diperlukan adanya:

- Kebijakan dan peraturan untuk mendorong dilaksanakannya upaya-upaya efisiensi dan konservasi energi,
- sistem pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi terbarukan,
- review existing regulasi yang dapat menghambat penggunaan sampah kota dan limbah lainnya sebagai sumber energi.

Sektor Limbah, diperlukan adanya:

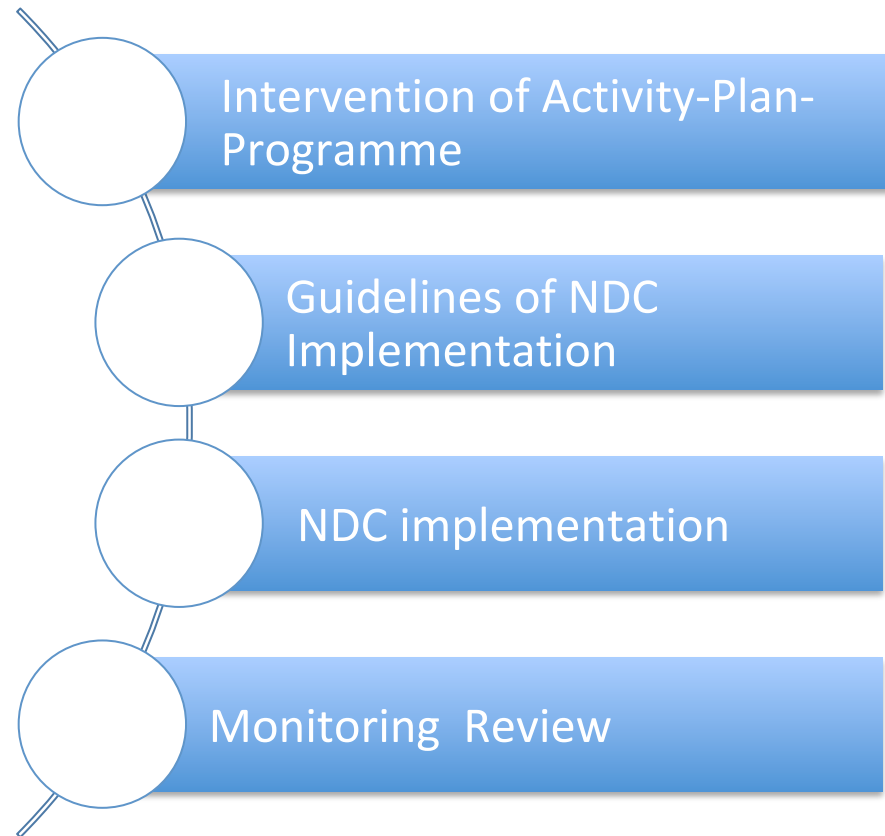
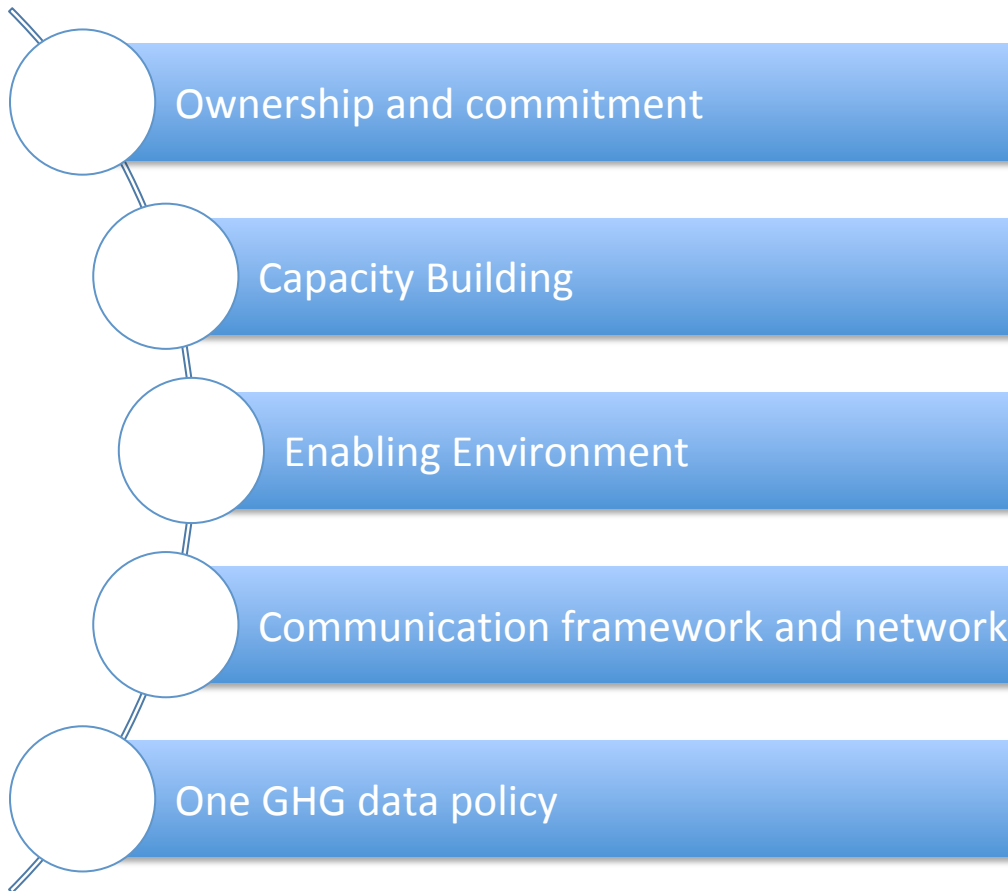
- Bantuan teknologi dan sistem pendanaan untuk meningkatkan jumlah jaringan saluran rumah tangga untuk pemanfaatan gas landfill.
- Bantuan teknis dan sistem pendanaan untuk kota/kabupaten agar dapat mengoperasikan TPA sebagai *managed* landfill dan dilengkapi dengan sistem penanganan/pemanfaatan gas metan.
- Sinkronisasi regulasi terkait emisi dari penggunaan RDF dan limbah pada B3 untuk pembangkit listrik di industri.
- Perbaiki regulasi terkait pemanfaatan sludge IPAL industri.
- Kebijakan kontrak jual beli listrik dan tipping fee yang kondusif untuk mendorong pengembangan PLTSA.
- Kebijakan kontrak jual beli listrik yang kondusif.

Sektor IPPU, diperlukan adanya:

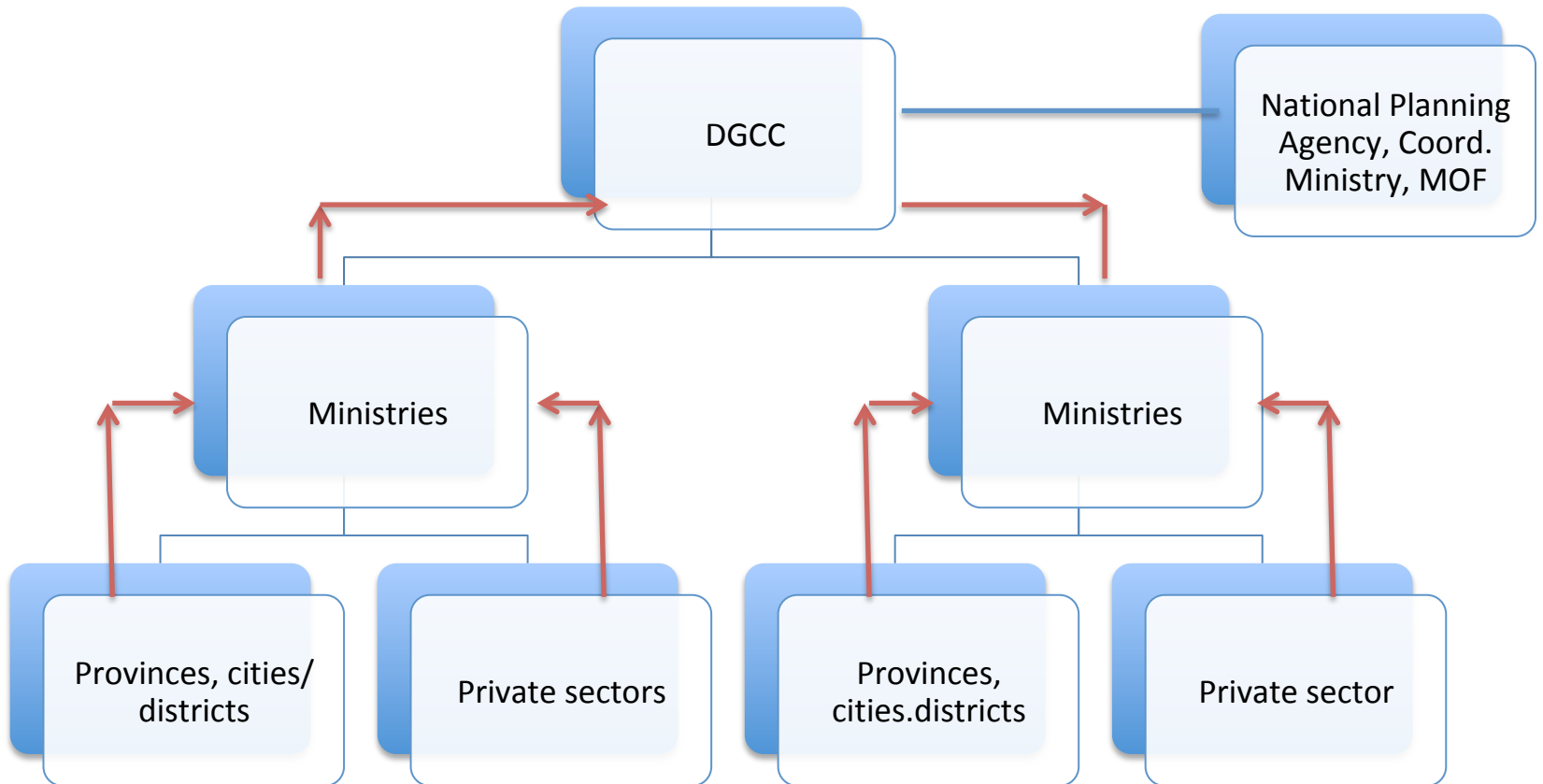
- Kebijakan insentif dan skema pendanaan investasi yang menarik.
- Regulasi terkait batasan (CAP) emisi GRK di industri dan sistem pelaporan yang mendorong industri melaporkan capaian reduksi emisi GRK sektor IPPU.
- Dukungan pemerintah untuk memfasilitasi komunikasi antara produsen semen dengan konsumen mengenai batasan klinker ratio dan kualitas semen.

MENUJU 2020

STRATEGIES



Tata Kelembagaan



— Coordination
— Reporting

DJEBTKE

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



SISTEM REGISTRASI NASIONAL



PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM



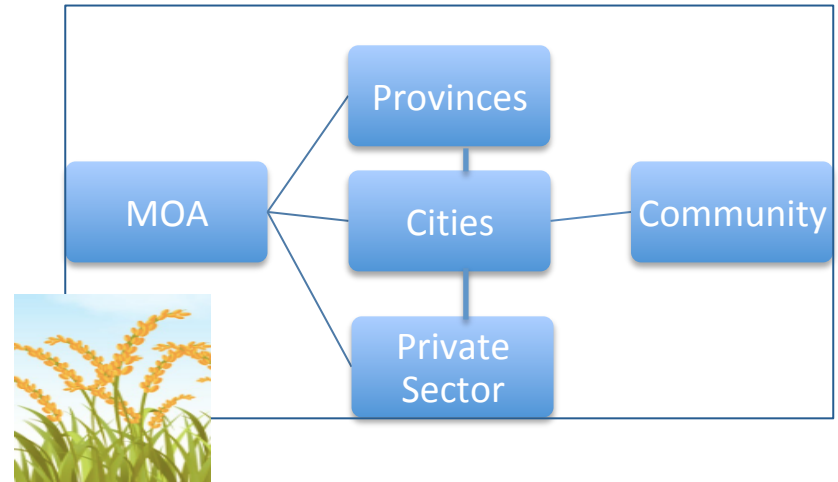
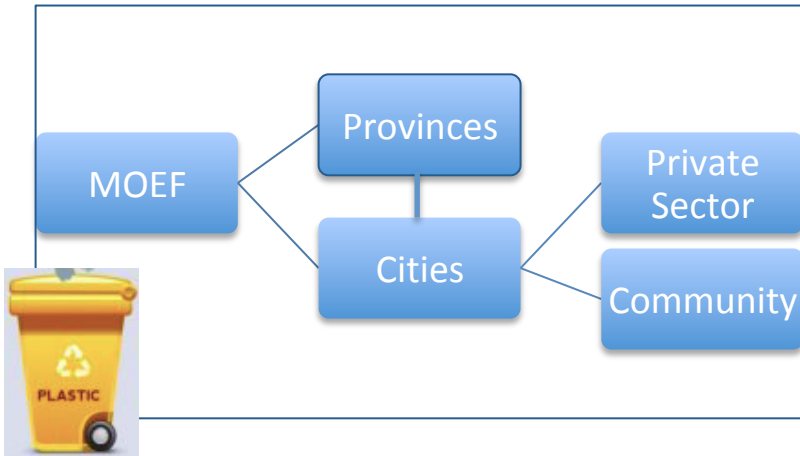
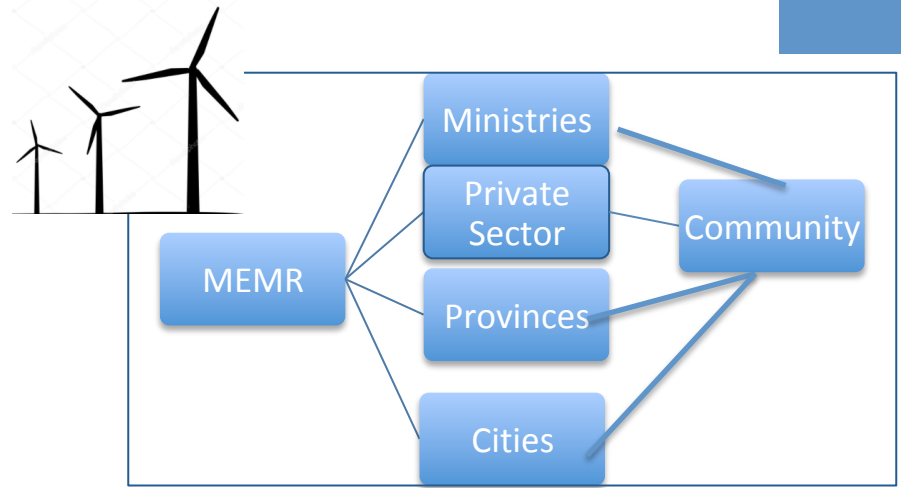
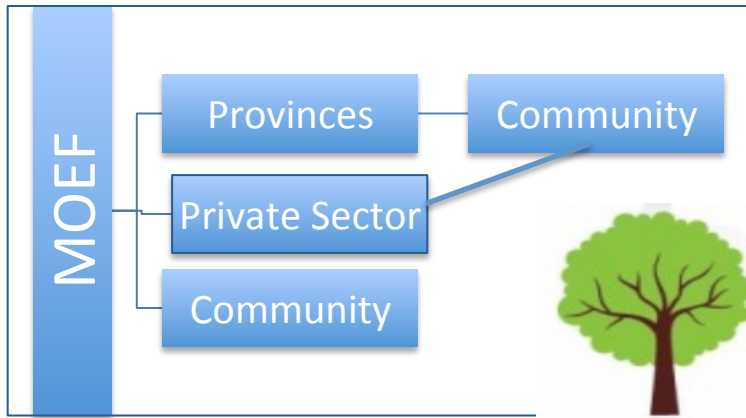
SIGN SMART
[signsmart.menlhk](http://signsmart.menlhk.go.id)



Sistem Informasi Safeguards REDD+ Indonesia
ditjenppi.menlhk.go.id

+

NON-PARTY STAKEHOLDERS MECHANISM



TANTANGAN

UMUM

- Specific regulations/policies
- Aggregation of baseline and achievement PS and NPS
- Technical Capacity
- Financial gaps
- Potential of double counting,
- Transparency Framework

TINGKAT NASIONAL

Integration into national programme and budgetting, ad-hoc institutions

Provincial level

data availabilitty and validity, ad-hoc institutions

Cities level

Limited mandate in forestry and energy sectors,

Community level

Public awareness, data availability and validity

Private sector

MRV system, incentive system, double counting, market mechanism

MENUJU 2050



2030

2050

Potensi Mitigasi
lain: BECCS/CCUS,
HFC phase-down,
Kebijakan sektor, dll

Pembangunan
rendah emisi
GRK dan
berketahanan
iklim